



Siaran Pers

Badan Kerja Sama
Antar-Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:

Ged. Nusantara III, Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta
10270 Indonesia

Website:

<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:

[@bksapdpri](https://twitter.com/bksapdpri)

Instagram:

[@bksapdpri](https://www.instagram.com/bksapdpri)

YouTube:

[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAPDPRRI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

Delegasi DPR RI Tegaskan Komitmen Multilateralisme, Dialog Antarperadaban, dan Dukungan terhadap Palestina dalam Sidang ke 16 APA di Bahrain

Manama, 27 Januari 2026 - Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil bagian secara aktif dalam seluruh rangkaian Sidang *Asian Parliamentary Assembly* (APA) ke-16 yang berlangsung di Manama, Bahrain, pada 24–28 Januari 2026. Dalam berbagai sesi—mulai dari Sidang Pleno, *Standing Committee on Political Affairs*, hingga *Standing Committee on Budget and Planning*—Indonesia menegaskan peran strategisnya dalam memperkuat kerja sama antarparlemen Asia dan memajukan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan tata kelola demokratis.

Pada sesi *General Debate*, Ketua BKSAP DPR RI yang juga Ketua Delegasi Indonesia, Dr. Syahrul Aidi Maazat, menyampaikan apresiasi kepada Kerajaan Bahrain dan Sekretariat APA atas penyelenggaraan sidang yang inklusif. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa Asia merupakan rumah bagi peradaban besar yang selama berabad-abad hidup melalui dialog, pertukaran budaya, dan kerja sama sosial. Indonesia melihat bahwa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan melemahnya kepercayaan global, parlemen-parlemen Asia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar dialog antarbudaya tetap menjadi fondasi stabilitas kawasan.

Masih di sesi *General Debate*, Syahrul Aidi Maazat—yang berasal dari Dapil Riau II—menegaskan bahwa multilateralisme yang konsisten dan tanpa standar ganda menjadi kunci penyelesaian berbagai tantangan global. Dalam konteks inilah Indonesia kembali menyampaikan dukungan kokoh terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota sejalan dengan Resolusi PBB. Dukungan ini, kata politikus PKS yang juga anggota Komisi I DPR RI, bukan sekadar sikap politik, tetapi sebuah komitmen kemanusiaan yang berakar pada penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip anti-penjajahan.

Dalam *Standing Committee on Political Affairs*, Habib Idrus Salim Aljufri mewakili BKSAP DPR RI menyampaikan penyesalan karena tidak dapat menghadiri pertemuan sebelumnya di Mashhad, Iran pada 2025 silam. Politikus PKS yang juga anggota Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa seluruh dokumen telah dipelajari secara seksama. Indonesia mengapresiasi hasil kerja komite, termasuk rekomendasi sembilan draf resolusi yang menyoroti *governance*, demokrasi, multilateralisme, hingga perkembangan situasi Palestina. Delegasi Indonesia secara khusus mengusulkan penyesuaian istilah dalam resolusi—misalnya mengganti frasa “*Zionist Entity*” dengan “*Israeli occupying authorities*”—agar seluruh dokumen selaras dengan praktik diplomasi dan terminologi yang digunakan dalam Dewan Keamanan PBB maupun Majelis Umum PBB.

Habib Idrus—legislator terpilih dari Dapil Banten III—juga menyampaikan masukan substantif terhadap sejumlah resolusi, seperti penguatan prinsip transparansi dalam penanganan anggaran saat krisis, penyempurnaan terminologi HAM sesuai standar internasional, serta penegasan bahwa kerja sama internasional dalam isu *governance* tidak boleh menjadi instrumen tekanan politik. Pada isu Palestina, Indonesia menekankan kebutuhan untuk memperkuat akses kemanusiaan, mendorong gencatan senjata segera, dan menegakkan mekanisme akuntabilitas sesuai hukum internasional.

Sementara itu, dalam *Standing Committee on Budget and Planning*, anggota BKSAP DPR RI dari Fraksi PDIP Samuel Wattimena menyampaikan penghargaan kepada Bahrain dan Sekretariat APA atas kelancaran penyelenggaraan pertemuan. Delegasi Indonesia juga menyampaikan penyesalan atas ketidakhadiran pada pertemuan komite sebelumnya di Doha pada Desember 2025, namun memastikan bahwa seluruh hasil telah ditelaah dengan baik. Anggota Komisi VII DPR RI tersebut kemudian menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan keuangan organisasi, sambil meminta beberapa dokumen penting—seperti laporan keuangan audit dan rencana strategis APA—yang dibutuhkan untuk memproses kontribusi tahunan sesuai regulasi nasional.

Dalam diskusi mengenai tata kelola anggaran APA, Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah I Samuel Wattimena mendorong penguatan mekanisme transparansi, penggunaan indikator berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan keuangan. Indonesia menilai bahwa tata kelola yang baik merupakan prasyarat penting bagi kredibilitas dan efektivitas organisasi di masa depan.

Secara keseluruhan, partisipasi DPR RI dalam Sidang APA tahun ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu motor diplomasi parlementer Asia. Dengan membawa nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mempromosikan dialog, inklusivitas, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan penyelesaian damai atas berbagai konflik. Indonesia juga menegaskan bahwa parlemen adalah penjaga kepentingan rakyat, jembatan antarbangsa, dan benteng utama dalam mempertahankan tata dunia yang adil dan setara.

Dengan komitmen tersebut, DPR RI berharap APA terus berkembang menjadi wadah yang lebih kuat, lebih relevan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan bangsa-bangsa Asia dalam menghadapi tantangan masa depan.

(*****)